Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 28180-28186

Dinamika Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Jawa Barat: Analisis Indeks Williamson dan Tipologi Klassen

Indira, Putri Permatasari[1]
[1]Universitas Padjadjaran

Penulis Korespondensi: Indira, Putri Permatasari, e-mail: indira22001@mail.unpad.ac.id

Published: May , 2026

ABSTRAK

Ketimpangan pembangunan wilayah menjadi salah satu permasalahan penting dalam pembangunan ekonomi daerah karena adanya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan antar kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat selama periode 2018–2023. Indeks Williamson digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan berdasarkan perbedaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita antar wilayah, sedangkan Tipologi Klassen digunakan untuk mengklasifikasikan sektor ekonomi berdasarkan laju pertumbuhan dan kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat ke dalam empat kategori, yaitu sektor prima, berkembang, potensial, dan tertinggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan di Jawa Barat masih tergolong tinggi dengan rata-rata nilai Indeks Williamson sebesar 0,72 selama periode penelitian, yang mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan dan pembangunan antar wilayah belum merata. Selain itu, hasil analisis Tipologi Klassen menunjukkan bahwa sebagian besar sektor ekonomi di Jawa Barat berada pada kategori sektor berkembang dan potensial, dan belum terdapat sektor yang tergolong sebagai kategori sektor prima. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum tersebar secara optimal antar sektor maupun antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemerataan wilayah melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan kualitas infrastruktur, serta optimalisasi kebijakan pembangunan daerah agar mampu mengurangi kesenjangan pembangunan antar kabupaten/kota dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Provinsi Jawa Barat.

Kata Kunci: Ketimpangan Pembangunan, Indeks Williamson, Tipologi Klassen, PDRB, Pembangunan Wilayah, Jawa Barat.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu proses yang berlangsung secara berkelanjutan dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Putri, 2026). Dalam pelaksanaannya, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari sisi sumber daya alam, kondisi ekonomi dan sosial budaya, adat istiadat, jumlah dan kepadatan penduduk, kualitas sumber daya manusia, letak geografis, maupun ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung pembangunan. Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan kemampuan masing-masing daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi juga tidak sama yang akan Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi regional pada dasarnya tidak selalu berlangsung secara merata antar wilayah (Elpisah *et al.*, 2021). Oleh karena itu, kebijakan pembangunan daerah perlu disusun dengan mempertimbangkan potensi, karakteristik, serta keunggulan yang dimiliki setiap wilayah agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan pembangunan. Selain mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi suatu daerah, indikator pertumbuhan ekonomi juga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan arah dan prioritas

kebijakan pembangunan di masa mendatang guna mencapai pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik (Thoyyibah *et al.*, 2025).

Menurut Sutrisno *et al.* (2024), Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar di Pulau Jawa dan menempati posisi ketiga dalam kontribusi perekonomian regional. Pada tahun 2023, Jawa Barat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00 persen yang didukung oleh tiga sektor utama, yaitu industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi, dengan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga konstan masing-masing sebesar 41,87 persen, 14,43 persen, dan 8,44 persen secara *year on year*. Selain itu, secara nasional perekonomian Jawa Barat memberikan kontribusi sebesar 16,77 persen terhadap Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku nasional pada tahun 2023.

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Harga Konstan Menurut Provinsi di Pulau Jawa 2018-2023 (Miliar Rupiah)

Tahun	Provinsi				
	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	Yogyakarta
2018	2.592.606,57	1.419.624,14	941.091,14	1.563.441,82	98.024.010
2019	2.815.636,16	1.490.959,69	991.516,54	1.649.895,64	104.485.460
2020	2.767.273,49	1.453.380,72	965.227,27	1.611.392,55	101.698.520
2021	2.912.885,34	1.507.746,39	997.321,13	1.668.754,36	107.372.560
2022	3.188.541,22	1.589.984,93	1.050.278,09	1.757.874,90	112.901.320
2023	3.443.359,21	1.669.406,36	1.102.473,58	1.844.808,68	118.625.540
Rata-Rata	**2.953.383,67**	**1.521.850,37**	**1.007.984,68**	**1.682.694,66**	**107.184.568,33**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel 1 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan sebesar 1.521.850,37 miliar rupiah selama periode 2016–2023 dan menempati posisi ketiga tertinggi di Pulau Jawa setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Namun demikian, besarnya nilai PDRB tidak dapat secara langsung digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat, karena setiap daerah memiliki jumlah dan kepadatan penduduk yang berbeda-beda (Lestari *et al.*, 2017). Dalam konteks pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi tercermin dari peningkatan PDRB yang mengindikasikan adanya kenaikan pendapatan nasional maupun regional. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi sering dijadikan sebagai indikator keberhasilan pembangunan suatu wilayah. (Elpisah *et al.*, 2021).

Tabel 2. Tingkat Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Harga Konstan Menurut Provinsi di Pulau Jawa 2016-2023 (Persen)

Tahun	Provinsi				
	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	Yogyakarta
2019	8,60	5,02	5,36	5,53	6,59
2020	-1,72	-2,52	-2,56	-2,33	-2,67
2021	5,26	3,74	3,33	3,56	5,58
2022	9,46	5,45	5,31	5,34	5,51
2023	7,99	5,00	4,97	4,95	5,07
Rata-Rata	**5,92**	**3,34**	**3,26**	**3,41**	**3,94**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel 2 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki rata-rata pertumbuhan PDRB sebesar 3,34 persen selama periode 2017–2023. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat cenderung stabil pada kisaran 5 persen sebelum pandemi COVID-19, namun mengalami kontraksi sebesar -2,52 persen pada tahun 2020 akibat perlambatan aktivitas ekonomi. Setelah itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat kembali mengalami pemulihan secara bertahap dengan mencapai 5,45 persen pada tahun 2022 dan 5,00 persen

pada tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki kemampuan pemulihan ekonomi yang cukup baik serta tetap berperan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.

Tabel 3. PDRB Perkapita di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2023 (Milyar Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	PDRB Perkapita
1.	Kab.Bogor	176.683,6
2.	Kab.Sukabumi	52.993,9
3.	Kab.Cianjur	36.339,5
4.	Kab.Bandung	92.830,1
5.	Kab.Garut	44.087,2
6.	Kab.Tasikmalaya	27.599,1
7.	Kab.Ciamis	25.111,7
8.	Kab.Kuningan	19.418,7
9.	Kab.Cirebon	37.246,5
10.	Kab.Majalengka	25.793,2
11.	Kab.Sumedang	26.876,8
12.	Kab.Indramayu	67.237,6
13.	Kab.Subang	67.237,6
14.	Kab.Purwakarta	51.740,5
15.	Kab. Karawang	187.051,6
16.	Kab.Bekasi	279.224,9
17.	Kab.Bandung Barat	35.062,1
18.	Kab.Pangandaran	8.869,8
19.	Kota Bogor	37.055,3
20.	Kota Sukabumi	9.801,8
21.	Kota Bandung	221.969,1
22.	Kota Cirebon	18.934,4
23.	Kota Bekasi	77.241,7
24.	Kota Depok	55.221,8
25.	Kota Cimahi	25.931,9
26.	Kota Tasikmalaya	17.781,9
27.	Kota Banjar	3.679,0

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2024

Data PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan adanya perbedaan tingkat pendapatan antar wilayah yang cukup signifikan yang mencerminkan masih terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Jawa Barat yang dipengaruhi oleh perbedaan potensi sumber daya, tingkat industrialisasi, kualitas infrastruktur, serta aktivitas ekonomi di masing-masing wilayah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi daerah belum berlangsung secara merata, sehingga diperlukan perumusan arah pembangunan yang lebih tepat sasaran berdasarkan identifikasi sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan daerah. Dalam konteks tersebut, analisis sektor unggulan menjadi penting untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan regional yang sesuai dengan karakteristik dan visi pembangunan daerah dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketimpangan regional dan mengidentifikasi karakteristik sektor ekonomi di Provinsi Jawa Barat

selama periode 2016–2023 menggunakan metode Tipologi Klassen untuk mengestimasi potensi sektor unggulan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, serta Indeks Williamson untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah.

METODE

Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk time series yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 Provinsi Jawa Barat periode 2018–2023, PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2018–2023, PDRB per kapita atas dasar harga konstan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2018–2023, jumlah penduduk setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2018–2023, serta jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat periode 2018–2023. Data tersebut digunakan untuk menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan wilayah dan mengidentifikasi karakteristik sektor ekonomi di Provinsi Jawa Barat.

Metode Analisis

Secara kuantitatif, analisis potensi ekonomi di setiap kabupaten/kota dilakukan menggunakan metode analisis Indeks Williamson yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi atau distribusi pendapatan antar wilayah dalam suatu daerah atau negara. Berikut adalah formula indeks Williamson (WI):

$$WI = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(Y_i - Y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{Y}$$

Keterangan:

Y_i = PDRB per kapita kabupaten/kota i

Y = PDRB per kapita rata-rata/provinsi

f_i = Jumlah penduduk kabupaten/kota i

n = jumlah penduduk seluruh daerah/provinsi

Nilai Indeks Williamson berada pada rentang 0 < IW < 1, di mana nilai indeks yang mendekati nol menunjukkan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah yang rendah atau semakin merata. Sebaliknya, semakin besar nilai Indeks Williamson hingga mendekati satu, maka semakin tinggi tingkat kesenjangan pembangunan antar wilayah yang terjadi. Kriteria tingkat kesenjangan berdasarkan nilai Indeks Williamson dapat diterapkan sebagai pedoman interpretasi sebagai berikut:

Tabel 4. Klasifikasi Nilai Indeks Williamson

Nilai Indeks Williamson	Kategori
IW < 0,35	Kesenjangan Ekonomi Taraf Rendah
0,35 < IW < 0,5	Kesenjangan Ekonomi Taraf Sedang
IW > 0,5	Kesenjangan Ekonomi Taraf Tinggi

Kemudian analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui pola dan struktur pertumbuhan sektoral, yang dikelompokan kedalam empat kategori berdasarkan kinerja pertumbuhan dan *share* terhadap pereknomian masing-masing wilayahnya. Tipologi Klassen membagi sektor ke dalam empat kelompok berdasarkan pertumbuhan dan *share* sektor terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat, yaitu sektor prima, berkembang, potensial, dan terbelakang.

Tabel 5. Matriks Tipologi Klassen

Pendapatan per Kapita \ Laju Pertumbuhan	$Y_{sektor} \geq Y_{PDRB}$	$Y_{sektor} < Y_{PDRB}$
$r_{sektor} \geq r_{PDRB}$	Sektor Prima	Sektor Berkembang
$r_{sektor} < r_{PDRB}$	Sektor Potensial	Sektor Terbelakang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Indeks Williamson Provinsi Jawa Barat selama periode 2018–2023 berada pada kisaran 0,69 hingga 0,73 dengan rata-rata sebesar 0,72. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Barat tergolong ke dalam kesenjangan taraf tinggi. Secara umum, nilai indeks menunjukkan tren yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2018 nilai Indeks Williamson tercatat sebesar 0,699 dan terus meningkat hingga mencapai 0,735 pada tahun 2022. Tingginya nilai indeks tersebut mengindikasikan bahwa distribusi pembangunan dan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat masih belum merata. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antar wilayah yang dipengaruhi oleh variasi aktivitas ekonomi, tingkat industrialisasi, kualitas infrastruktur, serta konsentrasi pembangunan antar wilayah.

Tabel 6. Hasil Perhitungan Indeks Williamson Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Tahun	Indeks Williamson	Klasifikasi Ketimpangan
2018	0,699740467	Taraf Tinggi
2019	0,695000836	Taraf Tinggi
2020	0,728081085	Taraf Tinggi
2021	0,732555457	Taraf Tinggi
2022	0,735314918	Taraf Tinggi
2023	0,734539984	Taraf Tinggi
Rata – Rata	**0,720872125**	Taraf Tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2024, diolah penulis

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Syaifudin et al. (2022) yang menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada periode 2016–2020 tergolong tinggi dengan nilai Indeks Williamson berada pada kisaran 0,64–0,66. Selain itu, penelitian Thoyyibah et al. (2025) juga menunjukkan hasil yang serupa, di mana tingkat ketimpangan pembangunan di Jawa Barat selama periode 2010–2020 berada pada kategori tinggi dengan nilai Indeks Williamson berkisar antara 0,65–0,69. Konsistensi hasil tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Barat masih menjadi permasalahan struktural yang berlangsung secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pembangunan ekonomi di Jawa Barat belum sepenuhnya mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan antar daerah.

Kemudian, berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2018–2023, sebagian besar sektor ekonomi masih berada dalam kategori sektor berkembang dan sektor potensial. Sektor berkembang menunjukkan sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan rata-rata, namun kontribusinya terhadap perekonomian daerah masih relatif rendah. Sementara itu, sektor potensial merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB, tetapi pertumbuhannya cenderung lebih rendah dibandingkan rata-rata sektor lainnya.

Tabel 7. Analisis Tipologi Klassen Potensi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Sektor PDRB Menurut Lapangan Usaha	Klasifikasi
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Terbelakang
B. Pertambangan dan Penggalian	Terbelakang
C. Industri Pengolahan	Potensial
D. Pengadaan Listrik dan Gas	Terbelakang
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Terbelakang
F. Konstruksi	Berkembang
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Terbelakang
H. Transportasi dan Pergudangan	Potensial
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Potensial
J. Informasi dan Komunikasi	Berkembang
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	Terbelakang
L. Real Estate	Berkembang
M,N. Jasa Perusahaan	Terkebelakang
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Berkembang
P. Jasa Pendidikan	Berkembang
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Berkembang
R,S,T,U Jasa Lainnya	Potensial

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2024, diolah penulis

Selama periode penelitian tidak terdapat satu pun sektor yang masuk ke dalam kategori sektor prima, yaitu sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan dan kontribusi ekonomi yang sama-sama lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Ketiadaan sektor prima ini mencerminkan bahwa struktur perekonomian Jawa Barat masih menghadapi tantangan dalam menciptakan sektor unggulan yang mampu menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi daerah secara optimal dan berkelanjutan. Selain itu, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya tersebar secara merata antar sektor ekonomi, sehingga kontribusi terhadap pembangunan wilayah masih terkonsentrasi pada sektor tertentu yang mengindikasikan bahwa sektor-sektor ekonomi di Jawa Barat belum mampu mencapai keseimbangan antara pertumbuhan yang tinggi dan kontribusi yang besar terhadap PDRB secara simultan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Barat selama periode 2018–2023 masih tergolong tinggi yang ditunjukkan oleh rata-rata nilai Indeks Williamson sebesar 0,720872. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa distribusi pembangunan dan pendapatan antar kabupaten/kota di Jawa Barat belum berlangsung secara merata. Tingginya ketimpangan dipengaruhi oleh perbedaan tingkat industrialisasi, infrastruktur, aktivitas ekonomi, serta konsentrasi pembangunan pada wilayah tertentu yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih cepat dibandingkan daerah lainnya. Di sisi lain, hasil analisis Tipologi Klassen menunjukkan bahwa sebagian besar sektor ekonomi di Jawa Barat berada dalam kategori sektor berkembang dan potensial, dan belum terdapat sektor yang tergolong sebagai sektor prima. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Jawa Barat memiliki kapasitas ekonomi yang besar dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, struktur pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya mampu menciptakan sektor unggulan yang berperan sebagai penggerak pembangunan secara optimal dan merata. Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, berorientasi pada pemerataan wilayah, serta penguatan sektor-sektor strategis guna mengurangi kesenjangan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

REFERENSI

Elpisah, E., Suarlin, S., & Yahya, M. (2021). *Klassen Typology and Williamson Index to Measure Macroeconomics in South Sulawesi Province*. *1*(1), 37–49.

Lestari, S., Gunawan, R. S., & Soedirman, U. J. (2017). *Economic Growth and Income Disparity between Regencies / Cities in West Java Province*. *12*(2), 43–49.

Putri, A. (2026). *Analysis of Inter-Regional Economic Development Inequality in Indonesia : Williamson Index Approach*. *2*(1), 33–42.

Sutrisno, Mubina, F., Rahmawati, S., Harris, M., & Makarim, H. (2024). *Analisis Potensi Lapangan Usaha Perekonomian 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat*.

Syaifudin, R., Verliana, A. D., Setyadi, S., & Desmawan, D. (2022). *Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Klasifikasi Wilayah antar Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020*. *3*(2), 117–124. https://doi.org/10.47065/jbe.v3i2.1688

Thoyyibah, M., Wafiq, A. Z., Hasanah, Z., & Pramesti, R. F. (2025). *Analysis of Disparities in District/City in West Java Province 2010-2020*. *1*(1), 1–12.